

BANTUAN BERAS KE INDIA TAHUN 1946**Ari Rahmad Hidayat**

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya

Email: embong_aspal20@yahoo.com**Aminuddin Kasdi**

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Bangsa Indonesia sebagai negara yang telah merdeka diharuskan untuk memenuhi syarat agar bisa menjadi negara berdaulat. Salah satu syarat negara berdaulat adalah mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara lain. Pada masa kabinet Sjahrir, Pemerintah Indonesia berupaya mendapatkan pengakuan kedaulatan, salah satunya melalui bantuan beras ke India. Latar belakang inilah yang menarik minat peneliti melakukan kajian kritis dan holistik terutama menyangkut hubungan peristiwa bantuan beras ke India. Peristiwa pemberian bantuan beras ke India selama ini selalu dituliskan secara umum. Belum pernah ada pembahasan yang mengulas secara apesifik mengenai teknis pengiriman beras dan dampaknya bagi Indonesia. Untuk merekonstruksi peristiwa Bantuan Beras ke India, peneliti menggunakan metode penelitian sejarah yang diantaranya ialah penelusuran sumber, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil kajian secara umum dapat dikatakan bahwa Peristiwa Bantuan beras ke India merupakan strategi diplomasi yang cemerlang dari PM Sjahrir. Melalui strategi mengirimkan beras ke India, Indonesia tidak hanya mampu menembus blokade ekonomi Belanda, namun juga berhasil mendapatkan pengakuan kedaulatan dari pemerintahan sementara India. Atas keberhasilan tersebut, peristiwa bantuan beras kemudian dinamakan diplomasi beras.

Kata kunci: kedaulatan, diplomasi, bantuan beras.**Abstract**

Indonesia as an independent country is required to qualify in order to be a sovereign state. One of the requirements is acquiring sovereignty recognition of other countries. At the time of Sjahrir's cabinet, Indonesian government tried to get the recognition by giving rice aid to India. This reason attract researcher to conduct a critical and holistic study about event rice aid to India. Event of rice aid to India has always been written in general. Has never been a discussion to review the technical rice delivery and its impact on Indonesia spesifically. To reconstruct the events of rice aid to India, the researcher uses historical research methods that include source tracing, source criticism, interpretation, and historiography. Research results in general is the events of rice aid to India is a brilliant diplomatic strategy of Prime-Ministry Sjahrir. Through the strategy of rice aid to India, Indonesia is not only able to penetrate the Dutch economic blockade, but also manage to get the recognition of the sovereignty of Indian transition government. Because of the success of rice aid to India, then that event was called diplomacy rice.

Keywords: Sovereign, Diplomacy, Rice Aid**PENDAHULUAN**

Cita-cita, harapan, dan proses perjuangan yang panjang dalam mewujudkan gagasan sebagai sebuah bangsa yang merdeka, lepas dari belenggu penjajahan terwujud ditandai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945. merupakan sebuah hasil manifestasi puncak keinginan politik (*political will*) bangsa Indonesia akibat praktek

kolonialisme dan imperialisme¹. Untuk menegakkan kedaulatan negara Indonesia yang baru saja didirikan, bangsa Indonesia terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat agar bisa dikatakan sebagai sebuah negara berdaulat. Syarat utama sebuah negara berdaulat diantaranya, memiliki wilayah yang berdaulat (*land*),

¹ Dr Suhartono. *Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994) hlm. 7

rakyat (*people*), serta pemerintahan yang berdaulat (*government*). Adapun syarat lain yang tidak kalah pentingnya ialah negara tersebut haruslah mendapat pengakuan kedaulatan dari negara lain, baik itu secara *de facto* maupun *de jure*.

Satu hari sesudah proklamasi kemerdekaan, para pemimpin politik bangsa Indonesia mengadakan sidang PPKI yang pertama untuk merumuskan dan menyusun pemerintahan negara Indonesia yang baru. Pada sidang tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan tiga keputusan penting diantaranya, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, memilih Ir Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia dan Moh Hatta sebagai Wakil Presiden, serta membentuk Komite Nasional sebagai badan pembantu Presiden selama MPR dan DPR belum terbentuk.

Pada tanggal 4 September 1945, Soekarno membentuk sebuah kabinet Presidensial dengan mengumumkan nama-nama menteri yang menjadi anggota kabinetnya. Sebagian besar menteri yang duduk dalam kabinet tersebut merupakan orang-orang yang dikenal mempunyai jabatan penting pada masa pendudukan Jepang, sehingga kabinet Soekarno dianggap hanya mengakomodir kepentingan-kepentingan Jepang². Sebelum menjalankan program kabinetnya, kabinet tersebut mendapatkan tekanan internal dan eksternal. Tekanan internal datang dari golongan pemuda yang menuntut agar pemerintahan baru Indonesia bebas dan bersih dari unsur-unsur fasisme Jepang³. Sedangkan tekanan eksternal muncul ketika pasukan Sekutu mulai mendarat di Indonesia yang turut membawa pasukan Belanda.

Belanda yang berhasrat menguasai kembali tanah jajahannya dengan membonceng tugas pasukan Sekutu ke Indonesia, tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan menuduh Pemerintahan Indonesia yang dipimpin Soekarno Hatta sebagai golongan kolaborator Jepang. Akibat tekanan-tekanan yang semakin keras dari internal maupun eksternal tersebut, maka diputuskan untuk mengganti sistem pemerintahan Indonesia dari Pemerintahan Presidensial menjadi Pemerintahan Parlemen.

Sutan Sjahrir, seorang pemimpin gerakan bawah tanah pada masa pendudukan Jepang yang menjadi ketua Badan Pekerja KNIP (BP-KNIP), kemudian ditunjuk sebagai formatur kabinet baru dengan tugas membentuk kabinet yang dapat diterima secara Internasional. Setelah Sjahrir selesai mengumpulkan nama-nama menteri yang akan duduk dalam anggota kabinetnya, maka pada tanggal 14 November 1945 Sutan Sjahrir secara resmi

diangkat menjadi Perdana Menteri Indonesia yang pertama⁴.

Pada masa awal pemerintahannya, Sutan Sjahrir dihadapkan pada aksi blokade ekonomi yang dilakukan Belanda untuk menghancurkan Republik melalui tekanan ekonomi. Blokade dilakukan Belanda pada bulan November 1945 dengan menutup pintu perdagangan luar negeri RI di sekitar wilayah perairan Jawa dan Sumatera. Aksi blokade ekonomi yang dilakukan Belanda tersebut menyebabkan perekonomian RI yang sudah hancur pasca pendudukan Jepang di Indonesia menjadi semakin terpuruk.

Ketika terdengar berita tentang bencana kelaparan yang terjadi di India, hal ini kemudian dimanfaatkan secara cerdas oleh PM Sjahrir dengan menawarkan bantuan beras sejumlah 500.000 ton kepada rakyat India. Tawaran bantuan beras tersebut digunakan Sjahrir untuk mematahkan aksi blokade ekonomi Belanda dan sekaligus mencari pengakuan kedaulatan Internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Tawaran beras Sjahrir kepada rakyat India disambut dengan baik oleh pemimpin India, Jawaharlal Nehru, justru dimana pada saat itu rakyat Indonesia sendiri sedang mengalami kekurangan bahan makanan.

Penelitian tentang bantuan beras ke India sangat menarik untuk dikaji secara mendalam dikarenakan peristiwa ini seringkali kurang mendapatkan apresiasi di dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia periode kemerdekaan. Buku-buku yang selama ini membahas tentang peristiwa bantuan beras ke India seringkali hanya memberikan informasi yang sangat terbatas hanya memberikan uraian tentang latar belakang peristiwa bantuan beras ke India tersebut. Selain itu, sampai saat ini penulis masih belum menemukan penelitian dengan judul maupun tema yang sama.

Selama melakukan penelusuran sumber sejarah, peneliti menemukan beberapa sumber referensi yang sedikit membahas peristiwa bantuan beras ke India secara umum. Buku-buku tersebut diantaranya adalah buku karya A.H Nasution yang berjudul "*Sekitar Perang Kemerdekaan III, 1945-1950: Diplomasi atau Bertempur*" (Bandung : Penerbit Angkasa, 1975), yang membahas peristiwa bencana kelaparan di India dan menyebabkan Pemerintah Indonesia melalui PM Sjahrir kemudian menawarkan bantuan beras sejumlah 500.000 ton kepada rakyat India.

Kedua buku karangan P.R.S Mani yang berjudul "*Jejak Revolusi 1945: Sebuah Kesaksian Sejarah*" (Jakarta: Grafiti, 1989), yang membahas latar belakang lahirnya tawaran beras PM Sjahrir kepada rakyat India. Di dalam buku ini juga membahas perundingan-perundingan perjanjian pengiriman beras yang dilakukan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah India.

Ketiga buku karya Robert Bridson Cribb, "*Gejolak Revolusi di Jakarta 1945-1949*" (Jakarta: Grafiti, 1996), yang menjelaskan tentang rintangan-rintangan yang dilakukan oleh para pemuda untuk

² J.D Legge. *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan; Peranan Kelompok Sjahrir*. (Jakarta: Grafiti, 2003) hlm. 179

³ Adam Malik. *Mengabdikan Republik Jilid II*. (Jakarta: Gunung Agung, 1978). Lihat juga Soebadio Sastrosatomo. *Perjuangan Revolusi*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987).

⁴ Moh Hatta. *Untuk Negeriku; Menuju Gerbang Kemerdekaan. Sebuah Otobiografi*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas) hlm. 115-116

menghalangi pengiriman beras ke daerah-daerah yang menjadi wilayah pendudukan Sekutu.

Selama melakukan pencarian sumber, penulis juga berusaha mengumpulkan jurnal maupun karya ilmiah yang membahas tentang pelaksanaan bantuan beras ke India, namun sampai sekarang penulis belum menemukan jurnal maupun karya penelitian yang mempunyai kesamaan pembahasan dengan judul skripsi penulis. Melalui pencarian di internet, penulis hanya mendapatkan informasi mengenai sebuah buku yang membahas mengenai Bantuan beras ke India karangan Prof Darmawan Mangoenkoesuma, yang berjudul *Pengiriman Beras Ke India* terbitan Kementerian Penerangan dengan tahun terbitan 1946.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil antara lain:

- 1) Apa latar belakang Indonesia memberi bantuan beras ke India?
- 2) Bagaimana pelaksanaan bantuan beras ke India tahun 1946?
- 3) Bagaimana dampak kebijakan bantuan beras ke India terhadap Indonesia?

Upaya bantuan beras yang dilakukan pemerintah Indonesia ke India pada tahun 1946 perlu dikaji dan dibuktikan dengan data yang kredibel, oleh sebab itu tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menganalisis latar belakang Indonesia memberikan bantuan beras ke India pada tahun 1946
- 2) Menjelaskan pelaksanaan bantuan beras dari Indonesia ke India tahun 1946.
- 3) Menjelaskan dampak kebijakan pelaksanaan bantuan beras ke India terhadap Indonesia.

Penulisan makalah ini berpedoman pada metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Tahap heuristik yaitu penelusuran sumber. Sumber-sumber yang telah didapatkan oleh penulis berupa surat kabar dan majalah yang sezaman dengan peristiwa bantuan beras ke India tahun 1946. Data yang sudah didapatkan oleh penulis perlu dilakukan kritik untuk mencari kebenaran dan menguji kredibilitas isi sumber. Hasil dari sumber yang telah dilakukan kritik dapat dipercaya sebagai fakta sejarah sehingga bisa mendukung proses penyajian data. Tidak semua data sejarah yang didapat dari hasil penelusuran sumber sejarah relevan dipakai sebagai data penunjang penelitian sejarah, baik segi otentisitas maupun isi.

Setelah melakukan kritik intern terhadap sumber yang telah diperoleh, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap sumber. Interpretasi dilakukan guna menghubungkan fakta-fakta yang sebelumnya telah dilakukan kritik. Tujuan dari interpretasi ini yaitu untuk merangkai fakta sejarah yang sudah diperoleh dan kemudian dicari saling hubungan antara masing – masing fakta sehingga bisa dijadikan sebagai rangkaian penulisan sejarah

Pada tahap akhir penelitian, setelah merekonstruksi fakta-fakta dalam setiap sumber dan data sejarah maka proses penulisan sejarah dapat dilakukan dengan judul “Bantuan Beras ke India tahun 1946”.

PEMBAHASAN

Latar Belakang Pemberian Bantuan Beras ke India

Satu hari sesudah proklamasi kemerdekaan, kesibukan dirasakan oleh para pemimpin politik bangsa Indonesia terutama untuk segera menyusun tatanan mengenai kehidupan kenegaraan. Pemerintahan baru di Indonesia kemudian terbentuk setelah Presiden Soekarno pada tanggal 4 September 1945 mengumumkan dibentuknya kabinet presidensiil⁵. Pembentukan kabinet tersebut mendapatkan tantangan dari kalangan internal dan eksternal bangsa Indonesia.

Tekanan internal terhadap kabinet presidensial Soekarno muncul dari golongan pemuda anti fasis yang menghendaki agar pemerintahan baru Indonesia bebas dari unsur-unsur fasisme Jepang⁶. Sedangkan tekanan eksternal berasal dari kedatangan kembali Belanda di Indonesia dengan membonceng tugas pasukan Sekutu. Belanda menghendaki agar Soekarno-Hatta yang mereka anggap sebagai golongan kolaborator Jepang pada masa perang, agar segera ditangkap dan diadili oleh Sekutu⁷.

Akibat dari tekanan-tekanan tersebut, Pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Wakil Presiden Moh Hatta, melalui Maklumat Wakil Presiden No X tanggal 16 Oktober 1945 menunjuk Sutan Sjahrir sebagai formatur kabinet baru. Kabinet baru perlu untuk segera dibentuk karena Indonesia sedang berusaha mencari pengakuan kedaulatan Internasional.

Sutan Sjahrir kemudian diangkat sebagai Perdana Menteri kabinet parlementer Indonesia pada tanggal 14 November 1945. Kebijakan politik kabinet Sjahrir adalah melakukan perundingan dengan Belanda untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan bagi Indonesia. Selain itu, Belanda yang melakukan aksi blokade ekonomi terhadap wilayah Republik di perairan Jawa dan Sumatera mengakibatkan pemerintah Indonesia tidak dapat melakukan kontak dengan dunia luar.

Ketika terdengar kabar bahwa di India sedang terjadi bencana kelaparan, hal ini segera dimanfaatkan secara cerdas oleh PM Sjahrir untuk kepentingan politik bangsa Indonesia. PM Sjahrir menawarkan bantuan beras sejumlah 500.000 ton kepada rakyat India. Walaupun rakyat Indonesia sendiri sedang mengalami kekurangan beras di dalam negeri, namun hal tersebut tidak menyurutkan langkah PM Sjahrir untuk tetap memberikan bantuan beras kepada India. Bantuan beras tersebut digunakan Sjahrir untuk menembus blokade ekonomi Belanda sekaligus untuk meraih dukungan Internasional terhadap kedaulatan Indonesia.

Pelaksanaan Bantuan Beras ke India

Pada tanggal 12 April 1946, PM Sjahrir secara resmi mengumumkan tawaran bantuan beras sebanyak 500.000 ton kepada Pemerintah India dengan pembayaran dalam

⁵ Yap Tjwan Bing. *Meretas Jalan Kemerdekaan*. (Jakarta: PT Gramedia, 1988) hlm 27

⁶ J.D Legge. *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan: Peranan Kelompok Sjahrir*. (Jakarta: Grafiti, 2003) hlm 136

⁷ R.H.A Saleh. “...Mari Bung Rebut Kembali!”. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000) hlm 58

bentuk natura (barter). Beras sebesar itu nantinya akan ditukarkan dengan barang kebutuhan, terutama dengan kain India yang pada saat itu sangat langka di Jawa⁸. Rencana Pemerintah Indonesia untuk memberikan bantuan beras kepada rakyat India yang menderita bencana kelaparan, pertama kali disampaikan oleh Perdana Menteri Sjahrir kepada P.R. Subra Mani koresponden surat kabar *Free Press Journal of Bombay* yang terbit di India pada tanggal 8 April 1946 dengan headline “*Sikap Kehendak Baik Indonesia kepada India, PM Sjahrir menawarkan 500.00 ton beras*”⁹.

Beras sebesar itu rencananya akan dipasok dari gudang penyimpanan beras terutama dari daerah Besuki, Cirebon, dan Karawang. Pada zaman pendudukan Jepang, daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang selalu mengalami surplus beras dan menjadi daerah penyangga bagi daerah yang mengalami defisit beras¹⁰.

Rencana bantuan beras Sjahrir ke India, sangat menggemparkan para pejabat tinggi Belanda. Hal ini dikarenakan tawaran beras kepada India dipandang Belanda berkaitan dengan upaya Republik untuk mengurangi kebutuhan beras pasukan Belanda di daerah yang didudukinya. Pada saat itu kondisi pasukan Belanda di daerah pendudukan memang sangat memprihatinkan karena kurangnya persediaan makanan akibat blokade yang dilakukan oleh pihak pejuang Republik. Belanda memprotes tindakan tersebut yang dianggap telah mencampuri urusan dalam negeri Belanda.

Guna menjembatani permasalahan tersebut, Inggris melalui Lord Killern, menawarkan solusi jalan tengah dengan membujuk PM Sjahrir agar mau mengirimkan sebagian beras Republik ke daerah-daerah yang menjadi wilayah pendudukan Sekutu¹¹. Akan tetapi, rencana tersebut akhirnya kandas karena mendapat tantangan keras dari pihak tentara dan laskar pejuang.

Perundingan pertama antara Pemerintah Indonesia dengan wakil pemerintah India, KL Punjabi, dimulai pada tanggal 18 Mei 1946. Setelah melalui beberapa kali perundingan, akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani dan bertukar nota perjanjian yang menandakan perundingan pengiriman beras telah berhasil. Penyerahan padi pertama dilakukan pada tanggal 20 Agustus 1946 di Probolinggo¹².

Kondisi kelaparan di India yang semakin parah akibat bencana kelaparan dan juga semakin memanasnya pertentangan politik dalam negeri India menjelang pengakuan kemerdekaan, pada tanggal 2 Oktober 1946, Punjabi, Setya Usaha Departemen Urusan Penyantunan

dan Persediaan Makanan Sekutu telah berangkat dengan pesawat ke Jakarta untuk mengurus percepatan pengangkutan beras. Akan tetapi, dalam bulan-bulan terakhir tahun 1946 pengiriman beras ke India dihentikan akibat memanasnya situasi politik di India maupun Indonesia.

Bantuan Beras dan Perkembangan Diplomasi Indonesia

Hubungan antara pemimpin politik India dan Indonesia bermula pada tahun 1927, ketika diadakan sebuah Konferensi Liga Anti Imperialisme dan Kolonialisme (*League Against Imperialism and Colonial Oppression*) di Brussel, Belgia¹³. Indonesia diwakili oleh Moh Hatta, sedangkan Jawaharlal Nehru hadir sebagai perwakilan India dalam kongres tersebut.

Hubungan tersebut semakin erat tatkala Pemerintah Indonesia melalui PM Sjahrir menawarkan bantuan beras sejumlah 500.000 ton kepada rakyat India yang sedang mengalami bencana kelaparan. Pengiriman beras ke India menunjukkan bukti kekuasaan *de facto* Republik terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Pemerintah. Bung Hatta, pada sebuah pidato radio tanggal 23 Juni 1946, mengatakan bahwa dalam tawaran beras PM Sjahrir terdapat tiga aspek penting, yakni; tanda rasa kemanusiaan, persaudaraan, dan aspek politik¹⁴. Dalam pidato perayaan satu tahun kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno menyatakan bahwa perjanjian pengiriman beras ke India merupakan suatu usaha politik diplomasi luar negeri yang sangat menggembirakan dan luar biasa¹⁵.

Akibat dari tawaran beras tersebut, Menteri Luar Negeri dalam Pemerintahan sementara India, Jawaharlal Nehru, pada tanggal 2 September 1946, menyetujui untuk memberikan pengakuan *de facto* kepada Indonesia¹⁶. Nehru mengatakan bahwa dengan diakuinya Republik, maka diharapkan akan menambah adanya perdamaian dunia, mencegah agresi, dan menolong tercapainya kemerdekaan. Dengan adanya pengakuan kedaulatan, Indonesia mendapat suatu pengakuan sebagai pelaku yang mandiri dalam pergaulan antar bangsa.

Selain itu pada tanggal 23 Maret - 2 April 1947, Nehru mengadakan Konferensi Inter Asia di New Delhi, India. Kongres tersebut bertujuan untuk mempererat hubungan antar bangsa-bangsa di Asia. PM Sjahrir diundang sebagai delegasi Indonesia dalam kongres tersebut. Ketika Sjahrir memasuki ruang konferensi,

⁸ Robert Bridson Cribb. *Gejolak Revolusi di Jakarta 1945-1946: Pergulatan Antara Otonomi dan Hegemoni*. (Jakarta: Grafiti, 1990) hlm. 11

⁹ P.R.S. Mani. *Jejak Revolusi 1945: Sebuah Kesaksian Sejarah*. (Jakarta: Grafiti, 1989) hlm. 117

¹⁰ Aiko Kurasawa. *Mobilisasi dan Kontrol: Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*. (Jakarta: Grasindo, 1993) hlm. 96

¹¹ Moh Roem. *Bunga Rampai dari Sejarah Jilid III*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1983) hlm. 282

¹² 30 Tahun Indonesia Merdeka. (Jakarta: Tira Pustaka Jaya, 1982) hlm. 108

¹³ Nasruddin Anshoriy & Djunaedi Tjakrawerdaja. *Rekam Jejak Dokter Pejuang dan Pelopor Kebangkitan Nasional*. (Yogyakarta: LKiS, 2008) hlm. 131

¹⁴ I Wangsa Widjaja & Meutia F Swasono. Mohammad Hatta: *Kumpulan Pidato dari Tahun 1942-1949*. (Jakarta: Yayasan Idayu, 1981) hlm. 81

¹⁵ “*Soembangan Moreel dari Loear Negeri; Kita Mendapat Kepercayaan sebagai Negara*”. Berdjoeang, 22 Agustus 1946

¹⁶ “*Nehru Menjetoedjoei Pengakoean Republik Indonesia*”. Berdjoeang, 6 September 1946

Sarojini Naidu, memperkenalkan Sjahrir sebagai *"The Atomic Prime Minister"*¹⁷.

Keberangkatan Sjahrir ke New Delhi sangat mencemaskan pihak Pemerintah Belanda. Belanda menganggap keberangkatan Sjahrir ke India sebagai bentuk lain dari "bisnis beras", sehingga Belanda mencoba mencegah keberangkatan Sjahrir ke India. Ketika Sjahrir menawarkan bantuan beras kepada rakyat India, Pemerintah Belanda menuduh bantuan beras tersebut berkaitan dengan upaya pihak Republik untuk mengurangi kebutuhan beras Belanda di daerah yang didudukinya di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Pemerintah Belanda sangat menentang pengiriman beras dengan mengajukan soal kesukaran di kota-kota pendudukan yang hampir kelaparan sebagai akibat blokade yang dilakukan oleh tentara dan laksar Republik.

Akibat semakin sulitnya mendapatkan beras, Pemerintah Belanda merencanakan untuk melakukan agresi militer guna menduduki daerah-daerah penghasil beras di wilayah Republik. Rencana agresi militer telah dipersiapkan semenjak bulan Maret - Mei 1947. Pada bulan Juli 1947, Belanda melakukan Agresi Militernya yang pertama dan berhasil menguasai sektor-sektor ekonomi vital Republik.

PENUTUP

Kesimpulan

Lahirnya negara Republik Indonesia sebagai hasil dari cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, mendapatkan ancaman ketika Belanda kembali datang ke Indonesia dengan membonceng tugas pasukan Sekutu. Belanda yang berhasrat ingin menguasai kembali bekas tanah jajahan yang sempat mereka tinggalkan dahulu, tidak mau mengakui eksistensi negara Indonesia yang mereka anggap didirikan oleh para kolaborator Jepang yang dipimpin Soekarno dan Hatta.

Hukum kedaulatan, menurut salah satu hukum Internasional, menyatakan bahwa sebuah negara yang baru saja merdeka, terlebih dahulu harus mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara yang sebelumnya berkuasa atas negara tersebut. Sebagai sebuah negara yang baru saja merdeka, bangsa Indonesia tentu tidak ingin kembali menjadi jajahan Belanda. Agar bisa mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda, pemimpin Republik menyerah kepada tuntutan Internasional. Kabinet presidensial Soekarno yang tidak mendapatkan pengakuan dari Belanda karena dianggap sebagai penjahat perang dunia II, menyerahkan kekuasaan kabinetnya kepada Sutan Sjahrir dengan membentuk sebuah kabinet parlementer yang bercorak kebarat-baratan untuk mengakomodasi tuntutan Internasional.

Pada awal kerja kabinetnya, Sjahrir dihadapkan pada aksi blokade ekonomi Belanda yang ingin menghancurkan Republik melalui tekanan ekonomi.

Blokade ekonomi tersebut dilakukan di wilayah perairan Jawa dan Sumatera untuk mencegah aktivitas perdagangan dengan dunia luar dan ekspor impor tidak dapat dilakukan oleh Republik. Blokade ekonomi yang dilakukan Belanda menyebabkan perekonomian Republik, yang belum sempat membenahi perekonomian negara yang hancur pasca pendudukan Jepang, menjadi semakin terpuruk.

Akibat blokade ekonomi Belanda, Pemerintah Republik memiliki sumber pendapatan yang sangat terbatas, namun pada saat yang sama sangat membutuhkan dana untuk membangun aparatur negara, terutama untuk membiayai perang gerilya melawan tentara kolonial Belanda. Ketika rakyat India sedang mengalami bencana kelaparan, hal ini kemudian dimanfaatkan secara cerdas oleh PM Sjahrir untuk kepentingan politik dengan menawarkan bantuan beras sejumlah 500.000 ton.

Melalui bantuan beras, Pemerintah Republik akan mempunyai dua keuntungan sekaligus. Keuntungan yang pertama ialah, apabila pengiriman beras dapat terealisasi maka bisa dipastikan blokade ekonomi Belanda akan dapat ditembus, sehingga akan membuka kembali aktivitas perdagangan dengan dunia luar. Keuntungan yang kedua, melalui bantuan beras tersebut, Pemerintah Indonesia berharap diakuinya kedaulatan RI oleh India. Kepentingan politik yang melekat dalam bantuan beras yang ditawarkan oleh PM Sjahrir, menjadikan pengiriman beras ke India disebut sebagai diplomasi beras.

Saran

Selama ini kajian mengenai Sejarah Indonesia, khususnya periode tahun 1945-1950 hanya terbatas dan selalu menyajikan peristiwa-peristiwa politik dan militer saja. Peristiwa-peristiwa diluar kedua pembahasan tersebut, seolah menjadi luput dari pita rekaman kisah perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Dalam penelitian yang berjudul Bantuan Beras ke India Tahun 1946 ini, penulis mencoba menyajikan sebuah peristiwa sejarah bangsa Indonesia yang tidak hanya menyangkut persoalan politik dan militer saja, namun juga menyangkut strategi diplomasi Pemerintah Indonesia dan Hubungan Luar Negeri, yang pada nantinya berujung pada pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada bulan Desember 1949.

Melalui penelitian ini, penulis berharap pada nantinya akan muncul karya-karya sejarah yang mau membahas sebuah peristiwa sejarah tidak hanya dari satu sudut atau sisi saja.

DAFTAR PUSTAKA

Anak Agung, Ide Gde Agung. 1973. *Twety Years Indonesian Foreign Policy 1945-1965*. Paris: Mouton The Hague

¹⁷

Atmakusumah (peny). *Mochtar Lubis: Wartawan Jihad*. (Jakarta: Gramedia, 1992) hlm. 45

- Ananta Toer, Pramoedya, Koesalah Soebagya Toer, dkk. 1999. *Kronik Revolusi Indonesia Jilid II 1946*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- Ananta Toer, Pramoedya, Koesalah Soebagya Toer, Ediati Kamil. 2001. *Kronik Revolusi Indonesia Jilid III 1947*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- Anwar, Rosihan (ed). 2010. *Mengenang Sjahrir: Seorang Tokoh Pejuang Kemerdekaan yang Tersisihkan dan Terlupakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Anwar, Rosihan. 1995. *Soebadio Sastrosatomo: Pengemban Misi Politik*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Caldwell, Malcolm, Ernst Utrecht. 2011. *Sejarah Alternatif Indonesia*. Jogjakarta: Djaman Baroe
- Cribb, Robert Bridson. 1990. *Gejolak Revolusi di Jakarta 1945-1949, Pergulatan Antara Otonomi dan Hegemoni*. Jakarta: Grafiti
- Dekker, Nyoman. 1989. *Sejarah Revolusi Nasional*. Jakarta: Balai Pustaka
- Esmara, Hendra, Heru Cahyono. 2000. *Jejak Perlawanan Begawan Pejuang: Soemitro Djojohadikusumo*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Elson, RE. 2009. *The Idea of Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Gagasan*. Jakarta: Serambi
- Feith, Herberth, Lance Castles (ed). 1988. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta: LP3ES
- Giebels, Lambert. 2001. *Soekarno: Biografi 1901-1950*. Jakarta: Penerbit Grasindo
- Hatta, Moh. 1982. *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*. Jakarta: Tintamas
- Hatta, Moh. 2011. *Untuk Negeriku: Menuju Gerbang Kemerdekaan Sebuah Otobiografi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Hatta, Moh. 1982. *Memoir*. Jakarta: Tintamas
- Kurasawa, Aiko. 1993. *Mobilisasi dan Kontrol, Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*. Jakarta: Grasindo
- Leifer, Michael. 1989. *Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Lubis, AB. 1991. *Bung Hatta Yang Saya Kenal*. Jakarta: Yayasan Marinda
- Malik, Adam. 1979. *Mengabdikan Republik Jilid I dan II*. Jakarta: Gunung Agung
- Mani, PRS. 1989. *Jejak Revolusi 1945: Sebuah Kesaksian Sejarah*. Jakarta: Grafiti
- Mrazek, Rudolf. 1996. *Sjahrir: Politik dan Pengasingan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor
- Nasution. AH. 1973. *Sekitar Perang Kemerdekaan Jilid II: Diplomasi atau Bertempur*. Bandung: Penerbit Angkasa
- Sjahrir, Soetan. 1947. *Pikiran dan Perjuangan*. Djakarta: Poestaka Rakjat
- Soekarno. 2005. *Di Bawah Bendera Revolusi Jilid I*. Jakarta: yayasan Bung Karno
- Sundhaussen, Ulf. 1986. *Politik Militer Indonesia, 1945-1967*. Jakarta: LP3ES
- Suwarno, Basuki. 1999. *Hubungan Indonesia-Belanda Periode 1945-1950*. Jakarta: Percetakan Upakara
- Tempo. 2010. *Sjahrir: Peran Besar Bung Kecil*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Tempo. 2010. *Hatta: Jejak yang Melampaui Zaman*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- van Zanden, Jan Luiten, Daan Marks. *Ekonomi Indonesia 1800-2010, Antara Drama dan Keajaiban Pertumbuhan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Wertheim, WF. 1999. *Masyarakat Indonesia dalam Transisi*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Yap Tjwan Bing. 1988. *Meretas jalan Kemerdekaan: Otobiografi Seorang Pejuang Kemerdekaan*. Jakarta: Gramedia